



**PEMERINTAH
KOTA METRO**

**RINGKASAN
LAPORAN
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN
DAERAH (R-LPPD)
KOTA METRO
PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2024**

RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH KOTA METRO

I. PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kota Metro adalah laporan yang memuat informasi terkait pelaksanaan pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran, yang disusun berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Laporan ini disampaikan oleh Wali Kota Metro kepada Pemerintah Pusat dan dipublikasikan melalui media cetak dan/atau elektronik untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai kinerja pemerintah daerah.

RLPPD menggambarkan capaian kinerja dari berbagai urusan yang ditangani oleh Pemerintah Kota Metro, yang dihimpun dari realisasi capaian masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan indikator-indikator yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Laporan ini mencakup dua hal utama, yaitu capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan capaian kinerja dalam pelaksanaan tugas pembantuan dari pemerintah pusat.

Tujuan dari laporan ini adalah untuk menunjukkan sejauh mana kebijakan, program, dan kegiatan yang telah direncanakan dalam RKPD dapat dilaksanakan selama satu tahun anggaran. Penyampaian RLPPD ini merupakan kewajiban kepala daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

I.2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2019;

II. GAMBARAN UMUM.

Secara astronomis, Kota Metro terletak antara $5^{\circ} 6' - 5^{\circ} 8'$ Lintang Selatan dan $105^{\circ} 17' - 105^{\circ} 19'$ Bujur Timur, dengan luas wilayah sebesar $73,21 \text{ km}^2$ dan ketinggian antara 25 hingga 75 meter di atas permukaan laut. Wilayah ini memiliki kemiringan tanah berkisar antara 0% hingga 3% serta suhu udara yang bervariasi antara 26°C hingga 33°C . Kota Metro terdiri dari dataran rendah yang meliputi area persawahan, permukiman, serta berbagai fasilitas pelayanan dan jasa.

Luas wilayah Kota Metro awalnya ditetapkan seluas $68,74 \text{ km}^2$ berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kota Metro, yang terdiri dari 5 kecamatan dan 22 kelurahan. Namun, seiring dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2016 tentang Peta Tapal Batas, luas wilayah Kota Metro diperbaharui menjadi $73,21 \text{ km}^2$.

Secara administratif, batas-batas wilayah Kota Metro adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara: Berbatasan dengan Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah dan Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur.

Sebelah Timur: Berbatasan dengan Kecamatan Pekalongan dan Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur.

Sebelah Selatan: Berbatasan dengan Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur.

Sebelah Barat: Berbatasan dengan Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah.

Penduduk Kota Metro terdiri dari beragam suku bangsa yang mencerminkan keragaman budaya dan adat istiadat yang berkembang seiring dengan kemajuan kota. Masyarakat Kota Metro hidup berdampingan dengan penuh keharmonisan, menghargai nilai-nilai budaya bangsa dan norma agama. Jumlah penduduk Kota Metro saat ini mencapai 178.381 jiwa, dengan rata-rata kepadatan penduduk sebesar 2.887 jiwa per km²

III. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA METRO TAHUN 2021 - 2026

Sebagaimana disebutkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 bahwa visi pembangunan dalam RPJMD adalah visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan Kepala Daerah. Menjalankan hal tersebut, kemudian ditetapkan visi pembangunan Kota Metro Tahun 2021-2026 adalah Visi Misi Kepala Daerah Kota Metro adalah *“Terwujudnya Kota Metro Berpendidikan, Sehat, Sejahtera, dan Berbudaya”*

Dalam rangka mencapai Visi *“Terwujudnya Kota Metro Berpendidikan, Sehat, Sejahtera, dan Berbudaya”*, maka ditetapkan 5 (lima) misi pembangunan tahun 2021-2026, yaitu sebagai berikut :

1. Misi 1 : Mewujudkan kualitas pendidikan dan kebudayaan yang berdaya saing di tingkat nasional dan global dengan menjunjung tinggi nilai keagamaan.
2. Misi 2 : Mewujudkan masyarakat sehat jasmani, rohani, dan sehat secara sosial.
3. Misi 3 : Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur fisik secara efektif, efisien, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan.
4. Misi 4 : Meningkatkan masyarakat produktif, berdaya saing dalam bidang teknologi, inovasi dan ekonomi kreatif.

5. Misi 5 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance), Terhormat, dan Bermartabat.

Arah Kebijakan Pembangunan

Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dalam rangka pemulihan kondisi sosial ekonomi akibat pandemic COVID-19	Meningkatkan kualitas infrastruktur yang berwawasan lingkungan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi dan pelayanan dasar serta pembangunan sumberdaya manusia	Meningkatkan produktivitas ekonomi dan kesejahteraan sosial masyarakat berbasis pembangunan berkelanjutan untuk mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas	Pemantapan pembangunan sumberdaya manusia untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, berbudaya dan berakhlak mulia.	Pemantapan pembangunan di seluruh bidang dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera

Berpedoman pada kebijakan pusat maupun provinsi dengan tetap menyesuaikan kondisi Kota Metro serta pencapaian indikator sasaran pembangunan RPJMD 2021-2026, maka Tema Pembangunan Kota Metro Tahun 2024 adalah “MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT BERBASIS PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN UNTUK MEWUJUDKAN SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS” dengan penjabaran sebagai berikut :

- a. Masyarakat sejahtera didefinisikan sebagai masyarakat yang produktif sehingga mampu memenuhi kebutuhan sosial, material dan spiritual
- b. Masyarakat berdaya saing didefinisikan sebagai masyarakat yang memiliki keunggulan komparatif, mandiri dan terbuka dengan tetap memegang teguh nilai-nilai budaya dan agama.

- c. Pembangunan yang merata didefinisikan sebagai pembangunan yang dilaksanakan secara optimal di seluruh wilayah sesuai dengan peruntukan ruang sehingga kehidupan sosial dan ekonomi dapat berjalan maksimal.
- d. Pembangunan yang berkeadilan didefinisikan sebagai pembangunan yang pro rakyat untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan

Dari tema tersebut disusun 4 (empat) prioritas dalam bagan sebagai berikut :

PRIORITAS KE-1: PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA	PRIORITAS KE-2 : PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR YANG BERKELANJUTAN	PRIORITAS KE-3 : PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE)	PRIORITAS KE-4: PENGUATAN STRUKTUR EKONOMI YANG PRODUKTIF DAN BERDAYA SAING
1. Pendidikan 2. Kesehatan 3. Perlindungan sosial 4. Pengentasan kemiskinan 5. Kualitas Perempuan dan Anak 6. Prestasi olahraga 7. Kualitas pemuda 8. Pemberdayaan masyarakat 9. Pelestarian kebudayaan 10. Peningkatan literasi masyarakat 11. Memperkuat moderasi beragama 12. Penguatan modal sosial	1. Penguatan konektivitas 2. Pengembangan wilayah 3. Integrasi sistem drainase 4. Persampahan 5. Peningkatan sanitasi masyarakat 6. Peningkatan kualitas gedung yang memiliki fungsi strategis 7. Penyediaan air bersih 8. Penambahan RTH Publik	1. Perencanaan yang profesional 2. Pengelolaan keuangan yang akuntabel 3. Pelayanan publik yang prima 4. Peningkatan sistem pengawasan penyelenggaraan pemerintahan 5. Pelayanan birokrasi yang transparan , professional dan berprinsip keadilan 6. Penguatan system pemerintahan berbasis elektronik	1. Peningkatan produktivitas sector ekonomi 2. Peningkatan nilai tambah 3. Peningkatan daya beli masyarakat 4. Ketahanan pangan 5. Tenaga kerja yang berdaya saing

IV. RINGKASAN REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN ANGGARAN DAERAH

Pendapatan Daerah Kota Metro Tahun 2024 direncanakan Rp.1.047.706.141.440,00,- terealisasi sebesar Rp.1.040.235.783.348,25 atau mencapai 99,29%, penerimaan tersebut diperoleh dari :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan Rp.341.760.529.521,17 terealisasi sebesar Rp. 332.145.948.665,25 atau 97,19 %.
2. Pendapatan Transfer ditargetkan Rp.705.945.611.918,83 terealisasi Rp.708.089.834.683 atau 100,30 %.

Belanja Daerah direncanakan Rp.1.080.285.185.816,00 dengan realisasi Rp.1.46.759.010.508,00 atau mencapai 96,10%, yang dialokasikan untuk :

1. Belanja Operasi, ditargetkan Rp.971.000.175.774,00 terealisasi Rp.942.570.992.143,00 atau mencapai 97,07%.
2. Belanja Modal, ditargetkan Rp.106.835.010.042,00 terealisasi Rp.102.417.809.060,00 atau mencapai 95,87 %
3. Belanja Tidak Terduga ditargetkan Rp.500.000.000,00 terealisasi Rp.224.000.000,00 atau mencapai 44,80 %
4. Belanja Transfer ditargetkan Rp.1.950.000.000,00 terealisasi Rp.1.546.209.305,00 atau mencapai 79,29 %

Defisit Anggaran Pendapatan dan belanja daerah ditutup dari pembiayaan Netto sebesar Rp 55.176.986.645,- terdiri dari penerimaan pembiayaan sebesar Rp 59.176.986.645,- dan Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp 4.000.000.000,-

V. REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN APBD TAHUN 2024 BERDASARKAN URUSAN.

Anggaran dan Realisasi Anggaran Kota Metro Tahun 2024

Pada tahun anggaran 2024, Pemerintah Kota Metro mengalokasikan anggaran sebesar Rp 1.080.285.185.816,00. Dari jumlah tersebut, realisasi anggaran yang tercapai sebesar Rp 1.046.759.010.508,00, yang menunjukkan tingkat penyerapan anggaran sebesar 96,90%. Berikut adalah rincian alokasi anggaran berdasarkan sektor dan jenis urusan yang dibiayai oleh anggaran tersebut.

1. Urusan Wajib

Urusan wajib meliputi pelayanan dasar yang harus disediakan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Berikut adalah rincian anggaran dan realisasi pada sektor urusan wajib:

Pelayanan Dasar Pendidikan: Dengan anggaran sebesar Rp 193.122.523.554,00, realisasi yang tercapai mencapai 98,79%, yaitu Rp 190.792.514.143,00.

Pelayanan Dasar Kesehatan: Anggaran sebesar Rp 409.337.757.706,00 direalisasikan sebesar Rp 401.906.487.096,00 (98,18%).

Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang: Alokasi anggaran sebesar Rp 55.057.436.675,00, dengan realisasi Rp 54.363.881.119,00 (98,74%).

Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman: Anggaran yang dialokasikan adalah Rp 6.181.177.311,00, dengan realisasi mencapai Rp 5.942.175.499,00 (96,13%).

Pada sektor ini, sebagian besar anggaran terealisasi dengan baik, di atas 95%, menandakan pengelolaan yang efisien dalam pelayanan publik dasar.

2. Urusan Pilihan

Selain urusan wajib, terdapat sektor-sektor pilihan yang mendukung pembangunan dan pengembangan wilayah. Berikut adalah rincian anggaran dan realisasi pada sektor pilihan:

Kelautan dan Perikanan: Dengan anggaran sebesar Rp 292.953.630,00, realisasi tercapai 98,05% (Rp 287.254.220,00).

Pariwisata: Anggaran sebesar Rp 2.300.000.000,00 direalisasikan sebesar 97,30% (Rp 2.237.996.524,00).

Pertanian: Anggaran sebesar Rp 1.249.772.800,00, dengan realisasi Rp 1.153.673.676,00 (92,31%).

Perdagangan: Anggaran sebesar Rp 7.725.853.147,00, dengan realisasi mencapai 98,41% (Rp 7.603.087.071,00).

Urusan pilihan ini juga menunjukkan penyerapan anggaran yang baik, meskipun ada sedikit variasi pada beberapa sektor seperti pertanian yang memiliki realisasi di bawah 95%.

3. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

Urusan pemerintahan fungsi penunjang mencakup berbagai kegiatan administratif dan pengawasan yang mendukung jalannya pemerintahan. Rincian anggaran dan realisasi pada sektor ini adalah sebagai berikut:

Administrasi Pemerintahan: Dengan anggaran Rp 46.816.990.531,00, realisasi mencapai 95,90% (Rp 44.899.750.202,00).

Pengawasan: Anggaran sebesar Rp 16.301.262.429,00 direalisasikan sebesar 90,10% (Rp 14.688.063.090,00).

Perencanaan: Anggaran Rp 9.623.142.716,00 tercapai 88,66% (Rp 8.531.691.942,00).

Keuangan: Dari anggaran Rp 52.034.107.522,00, realisasi yang tercapai adalah Rp 47.154.534.711,00 (90,62%).

Walaupun sebagian besar sektor dalam fungsi penunjang ini menunjukkan tingkat penyerapan yang memadai, ada beberapa sektor yang perlu perhatian lebih, seperti fungsi penunjang penelitian dan pengembangan yang hanya terealisasi 68,85%.

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KUNCI OUTCOME TAHUN 2024

No. IKK	Urusan	IKK Outcome	Capaian
1.a.1	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	100
1.a.2	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100,768289
1.a.3	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	99,301826
1.a.4	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100
1.b.1	Kesehatan	Rasio daya tampung Rumah Sakit Rujukan	5,7325295
1.b.2	Kesehatan	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	100
1.b.3	Kesehatan	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100
1.b.4	Kesehatan	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100
1.b.5	Kesehatan	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100
1.b.6	Kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100
1.b.7	Kesehatan	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100

No. IKK	Urusan	IKK Outcome	Capaian
1.b.8	Kesehatan	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100
1.b.9	Kesehatan	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100
1.b.10	Kesehatan	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100
1.b.11	Kesehatan	Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100
1.b.12	Kesehatan	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100
1.b.13	Kesehatan	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100
1.b.14	Kesehatan	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100
1.c.1	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di Wilayah Sungai Kewenangan Kab/Kota	0
1.c.2	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	0

No. IKK	Urusan	IKK Outcome	Capaian
1.c.3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	0
1.c.4	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	94,9123192
1.c.5	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	85,8022797
1.c.6	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	100
1.c.7	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	70,1815356
1.c.8.1	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	46,6101695
1.c.8.2	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100
1.d.1	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	0
1.d.2	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	0
1.d.3	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	0

No. IKK	Urusan	IKK Outcome	Capaian
1.d.4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	0,2616598
1.d.5	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	34,486429
1.e.1	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100
1.e.2	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100
1.e.3	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100
1.e.4	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	95,5665025
1.e.5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100
1.e.6	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100
1.e.7	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	7,02
1.f.1	Sosial	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	20,7290922
1.f.2	Sosial	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100

No. IKK	Urusan	IKK Outcome	Capaian
2.a.1	Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	61,1111111
2.a.2	Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	68,4450447
2.a.3	Tenaga Kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	80,6336316
2.a.4	Tenaga Kerja	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	94,2307692
2.a.5	Tenaga Kerja	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	55,0884956
2.g.1	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	6,4867133
2.g.2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten/kota	100
2.g.3	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	18,7654539
2.h.1	Pangan	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	154,496867
2.i.1	Pertanahan	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	100
2.i.2	Pertanahan	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	0
2.i.3	Pertanahan	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.	100

No. IKK	Urusan	IKK Outcome	Capaian
2.i.4	Pertanahan	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	0
2.i.5	Pertanahan	Tersedianya tanah untuk masyarakat	100
2.i.6	Pertanahan	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	0
2.j.1	Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	63,99
2.j.2	Lingkungan Hidup	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	75,8999918
2.j.3	Lingkungan Hidup	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	12
2.k.1.1	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Perekaman KTP elektronik	99,6230064
2.k.1.2	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	97,8103236
2.k.1.3	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kepemilikan akta kelahiran	100
2.k.1.4	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	100
2.1.1	Pemberdayaan masyarakat dan desa	Persentase pengentasan desa tertinggal	0
2.1.2	Pemberdayaan masyarakat dan desa	Persentase peningkatan status desa mandiri	0
2.m.1	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	TFR (Angka Kelahiran Total)	2,05

No. IKK	Urusan	IKK Outcome	Capaian
2.m.2	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	77,0542325
2.m.3	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	14,4206524
2.n.1	Perhubungan	Rasio konektivitas kabupaten/kota	21
2.n.2	Perhubungan	Kinerja lalu lintas kabupaten/kota	0,43
2.o.1	Komunikasi dan Informatika	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100
2.o.2	Komunikasi dan Informatika	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	100
2.o.3	Komunikasi dan Informatika	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	74,3765034
2.p.1	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	16,0377358
2.p.2	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	100
2.q	Penanaman Modal	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	-11,213226
2.r.1	Kepemudaan dan Olahraga	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	0,5929819
2.r.2	Kepemudaan dan Olahraga	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	6,7692952
2.r.3	Kepemudaan dan Olahraga	Peningkatan prestasi olahraga	42

No. IKK	Urusan	IKK Outcome	Capaian
2.s.1	Statistik	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100
2.s.2	Statistik	Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100
2.t	Persandian	Tingkat keamanan informasi pemerintah	60,7751938
2.u	Kebudayaan	Terlestarikannya Cagar Budaya	100
2.v.1	Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	78,43
2.v.2	Perpustakaan	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	94,41
2.w.1	Kearsipan	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Ps40 dan 59 U 43/2009)	47,44
2.w.2	Kearsipan	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	39,43
3.a	Kelautan dan Perikanan	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	94,0801448
3.b.1	Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	0
3.b.2	Pariwisata	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	8,0203721

No. IKK	Urusan	IKK Outcome	Capaian
3.b.3	Pariwisata	Tingkat hunian akomodasi	12,9568994
3.b.4	Pariwisata	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	2,8325472
3.b.5	Pariwisata	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	3,3881467
3.c.1	Pertanian	Produktivitas pertanian per hektar per tahun Produktivitas pertanian per tahun	590,154668
3.c.2	Pertanian	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular Persentase kasus zoonosis kab/ kota	-99,082569
3.d	Kehutanan		100
3.e	Energi dan Sumber Daya Mineral	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota	0
3.f.1	Perdagangan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	73,3333333
3.f.2	Perdagangan	Persentase kinerja realisasi pupuk	61,0742985
3.f.3	Perdagangan	Persentase alat & alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	63,1432545
3.g.1	Perindustrian	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kab/kota	11,8635171
3.g.2	Perindustrian	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	0

No. IKK	Urusan	IKK Outcome	Capaian
3.g.3	Perindustrian	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	0,6802721
3.g.4	Perindustrian	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	0
3.g.5	Perindustrian	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota	0
3.g.6	Perindustrian	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	0
3.h	Transmigrasi	Tidak Ada Kewenangan Kabupaten/Kota	100
4.a.1	Perencanaan dan Keuangan	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	22,3152825
4.a.2	Perencanaan dan Keuangan	Rasio PAD	31,9298715
4.a.3	Perencanaan dan Keuangan	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3,117
4.a.4	Perencanaan dan Keuangan	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3,02
4.a.5	Perencanaan dan Keuangan	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	84,4246662
4.a.6	Perencanaan dan Keuangan	Opini Laporan Keuangan	1

No. IKK	Urusan	IKK Outcome	Capaian
4.b.1	Pengadaan	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. yang ditandatangani pada kuartal pertama	0
4.b.2	Pengadaan	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	66,7295513
4.b.3	Pengadaan	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	33,6864998
4.b.4	Pengadaan	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	12,1480187
4.c.1	Kepegawaian	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	77,0715096
4.c.2	Kepegawaian	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	34,4339623
4.c.3	Kepegawaian	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	24,0635641
4.d.1	Manajemen Keuangan	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	6,0505557
4.d.2	Manajemen Keuangan	Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	18,0278964
4.d.3	Manajemen Keuangan	Manajemen Aset	4
4.d.4	Manajemen Keuangan	Cash Management: Rasio Anggaran Sisa terhadap Total Belanja dalam APBD Tahun Sebelumnya	2,6514891

No. IKK	Urusan	IKK Outcome	Capaian
4.e.1	Transparansi dan Partisipasi Publik	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)	98,1620412
4.e.2	Transparansi dan Partisipasi Publik	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	66,6666667

VI. CAPAIAN KINERJA DI BIDANG TATA KELOLA PEMERINTAHAN

1. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian Empat Belas Kali berturut-turut dari tahun 2010 s.d 2023.
2. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) mendapat nilai 69,48 Kategori B
3. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) tahun 2022 berdasarkan EPPD tahun 2023 mendapat nilai 3,4465 atau Sangat Tinggi dan berhasil mendapatkan penghargaan Parasamya Purna Karya Nugraha
4. Realisasi PAD terhadap Pendapatan Daerah mencapai 31,93%

VII. CAPAIAN KINERJA MAKRO

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM mengalami penurunan sebesar 0.751%, dari 80.46 menjadi 79.86. Meskipun terdapat penurunan, nilai IPM yang masih tinggi mencerminkan pencapaian dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan taraf hidup masyarakat secara umum.

2. Angka Kemiskinan

Angka kemiskinan menurun sebesar 6.868%, dari 7.28% menjadi 6.78%. Ini menunjukkan adanya pengurangan jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, yang bisa menjadi indikasi dari program-program pengentasan kemiskinan yang lebih efektif.

3. Angka Pengangguran

Angka pengangguran mengalami sedikit penurunan sebesar 3.056%, dari 3.71% menjadi 3.6%. Meskipun ada penurunan, tingkat pengangguran yang masih ada menunjukkan adanya tantangan dalam penciptaan lapangan pekerjaan yang cukup untuk menampung tenaga kerja yang tersedia.

4. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 4.86%, sedikit menurun dari 4.88% pada periode sebelumnya. Meskipun ada penurunan yang kecil, angka

pertumbuhan ekonomi yang positif menunjukkan adanya ekspansi ekonomi yang tetap stabil dan berkelanjutan.

5. Pendapatan Per-Kapita

Pendapatan per kapita mengalami peningkatan sebesar 6.691%, dari 45,236.83 menjadi 48,263.55. Peningkatan ini mencerminkan adanya pertumbuhan dalam daya beli masyarakat dan kualitas hidup yang lebih baik secara umum.

6. Ketimpangan Pendapatan

Ketimpangan pendapatan mengalami sedikit peningkatan, dengan nilai Gini Index meningkat dari 0.277 menjadi 0.289, meskipun ada penurunan persentase sebesar 4.152%. Ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi perbaikan dalam pendapatan, distribusi pendapatan belum sepenuhnya merata.

Capaian Kinerja Makro menggunakan Indikator Kinerja Makro Kota Metro

NO	IKK	RUMUS	CAPAIAN KINERJA 2023	CAPAIAN KINERJA 2024	LAJU KINERJA 2024	SATUAN
1	Indeks Pembangunan Manusia	Laju Indeks Pembangunan Manusia	79.86	80.46	0.751	%
2	Angka Kemiskinan	Laju Angka Kemiskinan	7.28	6.78	-6.868	%
3	Angka Pengangguran	Laju Angka Pengangguran	3.6	3.71	3.056	%
4	Pertumbuhan Ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi	4.86	4.88	0.412	%
5	Pendapatan Per-Kapita	Laju Pendapatan Per-Kapita	45236.83	48263.55	6.691	%
6	Ketimpangan Pendapatan	Laju Kelimpangan Pendapatan	0.289	0.277	-4.152	%

VIII. PRESTASI ATAU PENGHARGAAN YANG DIRAIH TAHUN 2024

No.	Prestasi/Penghargaan	Penyelenggara	Tanggal
1	Predikat “Baik” dalam Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan nilai indeks 3.04 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2024	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB)	11 Januari 2024
2	Peringkat III Kategori Kontribusi Penyelesaian BKPN	DJKN Wilayah Lampung dan Bengkulu	16 Februari 2024
3	Penghargaan Karya Bakti Peduli Satuan Polisi Pamong Praja	Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia	03 Maret 2024
4	Meraih Sertifikat Adipura Kategori Sedang Tahun 2024	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	5 Maret 2024
5	Peringkat ke-9 Terbaik Nasional dalam Penilaian Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) Tahun 2024	Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia	25 April 2024
6	Juara 2 Kejuaraan Judo Junior Terbuka 2024 Kategori U-19 berat -70 kg (Bianca Justisia Filza)	PB Judo	27-28 April 2024
7	Juara 2 Kejuaraan Judo Junior Terbuka 2024 Kategori U-19 berat -57kg (Tiara Fitri Nabila)	PB Judo	27-28 April 2024
8	Penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 14 kali berturut-turut dari Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2023	Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.	3 Mei 2024
9	Predikat Kota Terbaik ke-3 Tingkat Nasional Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2024	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas	6 Mei 2024
10	Penghargaan Kabupaten/Kota Kategori Prevalensi <i>Stunting</i> Terendah Tahun 2023	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	29 Juni 2024

No.	Prestasi/Penghargaan	Penyelenggara	Tanggal
11	Penghargaan atas Pelaksanaan Program Desa Siap Siaga Tahun 2024 dengan Membangun Ketahanan Desa yang Toleransi, Damai dan Anti Kekerasan	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	Juli 2024
12	Penghargaan BNPT Award atas Komitmennya dalam Mewujudkan Program Pencegahan Paham Radikalisme dan Terorisme	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) RI	16 Juli 2024
13	Penghargaan Tingkat Nasional Percepatan Penurunan Stunting dari BKKBN RI Dalam Rangka Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) ke 31 Tahun 2024	BKKBN RI	23 Juli 2024
14	Penghargaan bagi Dr. Wahdi Siradjuddin, Sp. OG(K) sebagai surveyor berprestasi dan inspiratif	Komisi Akreditasi Rumah Sakit	7 Agustus 2024
15	Penghargaan <i>Universal Health Coverage</i> (UHC) Award Kategori Utama Tahun 2024	BPJS Kesehatan	8 Agustus 2024
16	Peringkat III OSN SMP MAPEL IPA Tingkat Nasional	Balai Pengembangan Talenta Indonesia Pusat Prestasi Nasional, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi	10 Agustus 2024
17	Peringkat III OSN SMP MAPEL IPA Matematika Tingkat Nasional	Balai Pengembangan Talenta Indonesia Pusat Prestasi Nasional, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi	10 Agustus 2024
18	Peringkat III OSN SMP MAPEL IPS Tingkat Nasional	Balai Pengembangan Talenta Indonesia Pusat Prestasi Nasional, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi	10 Agustus 2024
19	Medali Emas pada O2SN Cabang Renang 50 m Gaya Dada Putri dan 100 m Gaya Dada Putri: Siswi SMP Muhammadiyah 1 Metro a.n. Yolanda Ferri Saputri	Kemendikbudristek	25 Agustus 2024
20	Medali Emas pada Olimpiade Cipta Puisi Nasional (OCPAS) 2024: Siswi MTs Darul A'mal	Kemendikbudristek	26 Agustus 2024

No.	Prestasi/Penghargaan	Penyelenggara	Tanggal
	Metro a.n. Sifa Nurfadilah dan Cantika Shofa Zakiyatul Muna		
21	Finalis Implementasi Kejar Terbaik Kategori Kabupaten/Kota	Otoritas Jasa Keuangan	22 Agustus 2024
22	Penghargaan AtasPartisipasi Aktif dan Kerjasama dalam Pelaksanaan Gerakan Nasional Pembagian 10 Juta Bendera Merah	Kementerian Dalam Negeri	31 Agustus 2024
23	Medali Perunggu Pencak Silat PON XXI Aceh Sumut (Rizki Andika Irawan)	PB Judo	9-20 September 2024
24	Medali Emas Judo PON XXI Aceh Sumut (Indah Permatasari)	PB Judo	9-20 September 2024
25	Juara 1 Pelajar Pelopor Keselamatan Berlalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Nasional Tahun 2024	Dirjen Perhubungan Darat	12 September 2024
26	Meraih Penghargaan Kategori Posyandu Berprestasi Bidang Kesehatan Tingkat Nasional Tahun 2024	Kementerian Kesehatan RI	13 September 2024
27	Penghargaan Wahana Tata Nugraha Kategori Kota Sedang Tingkat Nasional	Kementerian Perhubungan RI	17 September 2024
28	Masuk dalam 8 Besar Nominasi Anugerah Layanan Investasi 2024 Kategori Pemerintah Kota	Kementerian Investasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal	30 September 2024
29	Penghargaan Upakarya Wanua Nugraha Tahun 2024	Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia	08 Oktober 2024
30	Juara Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Regional Tahun 2024	Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia	08 Oktober 2024
31	Juara 1 Lomba Kelurahan Tingkat Nasional (Kelurahan Yosodadi)	Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia	08 Oktober 2024
32	Predikat Sangat Baik Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) Kota Metro	Badan Pangan Nasional	11 Oktober 2024
33	Predikat Kepatuhan Tertinggi dalam rangka Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024 (dengan nilai 97,21)	Ombudsman Republik Indonesia	01 November 2024

No.	Prestasi/Penghargaan	Penyelenggara	Tanggal
34	Juara Harapan I Tingkat Nasional Lomba Cerdas Cermat Museum 2024 ARUNIKA : Asah Rasa untuk Generasi Merdeka Berbudaya	Museum Nasional Indonesia bersama Indonesian Heritage Agency (IHA)	01-07 November 2024
35	Penghargaan Bhumandala Ariti (Medali Perunggu) Kategori Kota-Bhumandala Informasi Geospasial Batas Desa/Kelurahan	Badan Informasi Geospasial	04 November 2024
36	Penghargaan Lembaga Pemerintah Berkomitmen dalam Bidang Literasi 2024	Media Guru Indonesia	09 November 2024
37	Penghargaan Tokoh Penggerak Literasi Nasional Tahun 2024	Media Guru Indonesia	09 November 2024
38	Penghargaan Predikat Kepatuhan Tinggi terhadap Standar Pelayanan Publik Ombudsman RI pada Unit Pelayanan Disdukcapil Kota Metro Tahun 2024 dengan Nilai 98,58 Kategori A (Kualitas Tinggi)	Ombudsman Republik Indonesia	14 November 2024
39	Predikat Kepatuhan Pelayanan Publik Tahun 2024: Zona Hijau, kualitas tertinggi dengan nilai 97,21 (Peringkat ke-14 Kota secara Nasional)	Ombudsman RI	15 November 2024
40	NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) Manajemen ASN Kategori A Predikat Unggul	Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia	19 November 2024
41	Juara I Nasional Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Inovatif – Guru SD	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen)	24 November 2024
42	Juara I Nasional Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Dedikatif – Kepala SMP	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen)	24 November 2024
43	Juara V Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Inovatif – PPG Daljab	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen)	24 November 2024
44	Apresiasi Mitra Strategis Terinovatif dalam Pengendalian Inflasi	Bank Indonesia	29 November 2024
45	Tiga Besar Regional Barat Kota Pangan Aman	Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI	4 Desember 2024

No.	Prestasi/Penghargaan	Penyelenggara	Tanggal
46	Penghargaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Award Kategori Paripurna	Kementerian Kesehatan RI	10 Desember 2024
47	Peringkat Ke-97 Dari 508 Kabupaten/Kota Se-Indonesia Hasil Pengawasan Kearsipan Nasional Tahun 2024 dengan Predikat BB (Sangat Baik)	Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)	18 Desember 2024
48	Penghargaan Dalam Rangka “Penyampaian Hasil Evaluasi Pengawasan Penerapan Sistem Merit di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun 2024” : Nilai 298 Kategori Baik	Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia	19 Desember 2024
49	Indeks Profesionalitas ASN Kategori Tinggi	Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia	2024

IX. PENUTUP

Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kota Metro Tahun 2024 ini disusun sebagai bentuk pelaksanaan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan bahwa kepala daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD). Penyusunan laporan ini juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 mengenai Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Sedangkan, penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2024 didasarkan pada Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.2.2.7/10582/OTDA tanggal 24 Desember 2024 tentang Penyampaian Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024. Laporan ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai perkembangan Kota Metro, serta menggambarkan kemampuan Kota Metro dalam melaksanakan otonomi daerah.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa masih terdapat kelemahan dan kekurangan dalam penyajian laporan ini. Oleh karena itu, kami berharap agar di masa yang akan datang, kualitas laporan ini dapat lebih ditingkatkan, dengan mempertimbangkan masukan konstruktif dari berbagai pihak.

Terima kasih atas perhatian dan kerja samanya. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi semua pihak.

Metro, Maret 2025

WALI KOTA METRO,

Ttd

H1. Bambang Iman Santoso, S.Sos., M.Pd.I